

## EKONOMI POLITIK ISLAM: PENDEKATAN *MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH*

Ahmad Ubaidillah  
Universitas Islam Lamongan  
e-mail: ubaidmad@yahoo.com

***Abstract:** The Indonesian nation, which has undergone its independence for more than 70 years, experienced two major changes, namely in 1966 and 1998. 1966 gave birth to the New Order. The New Order period which lasted 32 years with a full orientation to pursue economic growth which was supported by security stability which killed democratic values. We have also gone through the reform era that was rolled out in 1998 which later gave birth to the state order as we feel today. During the 20 years or so of reformation, Indonesia's condition can be said to be more democratic even though it is still procedural which is marked by an election celebration party and post-conflict local election. However, economic orientation and development have almost no fundamental correction, no significant changes. The strategic economic policies taken by the government have not been in favor of the people. Potential economic resources are still held hostage by the interests of foreign countries. Both in the banking sector, insurance, capital markets, state-owned enterprises (BUMN), oil and gas mining and other economic sectors. The government only relies on the amount of economic growth, which does not contribute much to the real economy of the people. As a result, poverty and unemployment rates have not been significantly reduced. The quality of life of the people becomes low. In this paper, the author tries to study the economic growth which is always glorified by the ruling regime in the perspective of Islamic political economy. However, economic policies are inseparable from government political interference. Therefore, questions such as how is the political economy of Islam in view of economic growth amid the high poverty rate of the Indonesian people? Then what is the solution that Islamic political economy can provide in overcoming policies that are deemed not to benefit the people? From the discussion, the writer can provide some things that according to the authors are important to conclude. Islamic political economy is only one area of science that will be built based on the tauhid paradigm. Basically, all existing science needs to be built within the framework of the monotheistic paradigm. The emergence and development of Islamic civilization for more than a thousand years is always based on the Tawhid paradigm. At that time, all science was built on the basis of monotheism. The problem of economic development can be solved by tauhid paradigm.*

***Keywords:** Islamic Economic Politics, *Maqāṣid al-Sharī'ah* Approach*

### **Pendahuluan**

Bangsa Indonesia yang telah menjalani kemerdekaannya selama lebih dari 70 tahun mengalami dua kali perubahan besar, yaitu tahun 1966 dan 1998. Tahun 1966 melahirkan Orde Baru. Masa Orde Baru yang berlangsung 32 tahun dengan orientasi sepenuhnya mengejar pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas keamanan yang mematikan nilai-nilai demokrasi. Kita juga sudah menapaki era reformasi yang digulirkan pada 1998 yang kemudian melahirkan tatanan kenegaraan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Selama kurang lebih 20 tahun reformasi berjalan, kondisi Indonesia bisa dikatakan lebih demokratis meskipun masih bersifat prosedural yang ditandai dengan pesta perayaan pemilu dan pemilukada. Tetapi, orientasi ekonomi dan pembangunan hampir tidak ada koreksi yang mendasar, tidak ada perubahan yang signifikan. Kebijakan-kebijakan strategis ekonomi yang diambil pemerintah belum begitu berpihak pada rakyat. Sumber-sumber potensial ekonomi masih tersandera oleh kepentingan negara-negara asing, baik di sektor perbankan, asuransi, pasar modal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pertambangan minyak dan gas dan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Sementara itu, paket kebijakan yang diperuntukkan bagi kepentingan rakyat sangat minim. Kesejahteraan rakyat “dianaktirikan”. Jaminan sosial bagi rakyat terbelengkalai. Harga kebutuhan pokok semakin mahal. Pemerintah hanya mengandalkan besaran pertumbuhan ekonomi yang tidak banyak menyumbangkan ekonomi riil masyarakat. Akibatnya, angka kemiskinan dan pengangguran masih belum berkurang secara signifikan. Kualitas hidup rakyat pun menjadi rendah.

Model pengelolaan ekonomi Orde Baru yang dilanjutkan pada Era Reformasi rupanya belum mampu sepenuhnya menghadirkan keadilan ekonomi bagi semua. Kesenjangan ekonomi akibat penumpukan sumber-sumber ekonomi pada segelintir pemilik modal besar semakin menganga. Inilah “lubang hitam” kebijakan ekonomi Indonesia, terutama menyangkut pertumbuhan ekonomi yang masih perlu mendapat perhatian dari kita semua sebagai anak-anak bangsa, khususnya para ekonom muslim.

Melihat realitas ekonomi Indonesia yang menurut penulis kurang tepat, menarik apa yang dikatakan oleh seorang ahli ekonomi politik Islam, Farouk Abdullah Alwyini dari *Islamic Development Bank* (IDB) yang melihat secara dekat masalah ekonomi yang menghinggapai penduduk negeri-negeri berbasis penduduk muslim, seperti Indonesia. Salah satu kesimpulan yang dia peroleh bahwa perlu ada terobosan teoritik dan perspektif mengenai ekonomi politik. Ekonomi politik itu hendaklah yang selaras dengan budaya dan keyakinan penduduk negeri-negeri muslim itu. Dengan cara itulah problem yang bersifat hulu dapat ditangani secara dini. Pemikirannya ini diharapkan mampu melampaui debat wacana yang stagnan selama ini, khususnya di Indonesia, yakni debat antara negara Islam atau negara sekuler maupun syariat Islam atau konstitusionalisme.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis mencoba mengkaji pertumbuhan ekonomi yang hingga saat ini selalu diagung-agungkan oleh rezim yang berkuasa, dalam perspektif ekonomi politik Islam. Bagaimanapun juga, kebijakan-kebijakan ekonomi tidak terlepas dari campur tangan politik pemerintah. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan misalnya bagaimana ekonomi politik Islam dalam memandang pertumbuhan ekonomi di tengah angka kemiskinan rakyat Indonesia yang masih tinggi? Lalu apa solusi yang bisa diberikan ekonomi politik Islam dalam mengatasi kebijakan yang dinilai tidak menguntungkan rakyat banyak tersebut?

### **Definisi *Maqāṣid al-Sharī'ah***

Secara bahasa, *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-sharī'ah*. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-sharī'ah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut Istilah, al-

Shāṭibi menyatakan bahwa Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Menurut al-Shāṭibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan, yaitu *ḍarūriyyah* (kebutuhan primer), *ḥājīyyah* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyyah* (kebutuhan pelengkap).

Korelasi antara *ḍarūriyyah*, *ḥājīyyah*, dan *taḥsīniyyah* dijelaskan al-Shāṭibi sebagai berikut. *Pertama*, *maqāṣid ḍarūriyyah* merupakan dasar bagi *maqāṣid ḥājīyyah* dan *maqāṣid taḥsīniyyah*. *Kedua*, kerusakan pada *maqāṣid ḍarūriyyah* akan membawa kerusakan pula pada *maqāṣid ḥājīyyah* dan *maqāṣid taḥsīniyyah*. *Ketiga*, kerusakan pada *maqāṣid ḥājīyyah* dan *maqāṣid taḥsīniyyah* tidak dapat merusak *maqāṣid ḍarūriyyah*. *Keempat*, kerusakan pada *maqāṣid ḥājīyyah* dan *maqāṣid taḥsīniyyah* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *maqāṣid ḍarūriyyah*. *Kelima*, pemeliharaan *maqāṣid ḥājīyyah* dan *maqāṣid taḥsīniyyah* diperlukan demi pemeliharaan *maqāṣid ḍarūriyyah* secara tepat.

Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai nilai, tujuan dan rahasia syara' dalam semua atau sebagian besar hukumnya. Ulama *uṣūl al-fiqh* mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.<sup>1</sup>

### **Definisi Teori Ekonomi Politik**

Sebelum menjabarkan ekonomi politik Islam, perlu kiranya penulis menjelaskan sedikit pendekatan teori ekonomi politik secara umum. Pendekatan teori ekonomi politik dimakani sebagai interrelasi di antara aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi (produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi, dan lain sebagainya). Mengacu pada definisi tersebut, pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses, maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang diintrodusir oleh pemerintah<sup>2</sup>. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ekonomi politik adalah sebuah disiplin atau pemikiran terkait dengan pengaturan-pengaturan kehidupan ekonomi politik dari sebuah masyarakat, bangsa, dan negara.

Lebih jauh dapat dikatakan, pada dasarnya ekonomi politik adalah sebuah disiplin atau pemikiran terkait dengan pengaturan-pengaturan kehidupan ekonomi politik dari sebuah masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap ideologi besar seperti Komunisme, Sosialisme, Kapitalisme Pasar Bebas, dan model negara kesejahteraan akan mempunyai sebuah sistem ekonomi politik.

Islam sebagai sebuah sistem kepercayaan (*belief system*) tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga *mu'amalah*. Ia juga sebuah sistem kepercayaan yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan manusia di bumi ini, tetapi juga di akhirat kelak yang tentu saja mempunyai aturan main tersendiri terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi politik sebuah masyarakat, bangsa, dan umat.

<sup>1</sup> Abd Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet-IV (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1108.

<sup>2</sup> Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 10.

Teori ekonomi politik Islam akan berdasarkan syariah (dengan Quran dan Sunnah Rasul sebagai dasar utama). Secara umum, ekonomi politik Islam adalah sebuah sistem ekonomi politik yang akan menjadikan fungsi negara sebagai penegak hukum dan keadilan, yang akan memberikan perlindungan terhadap keyakinan, kehidupan, kekayaan, kehormatan, dan keturunan segenap masyarakat yang berada dalam yurisdiksi kekuasaan negara tersebut. Hal ini terkait dengan *maqāṣid al-sharī'ah* atau tujuan-tujuan syariah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Prinsip-prinsip umum dan derivatif ekonomi Islam terdiri dari tauhid, adil, *nubuwwah* (kenabian), *khilāfah* (pemerintahan), *ma'ād* (hasil), kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak, dan keadilan sosial.<sup>3</sup>

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produk barang dan jasa mengalami peningkatan. Pertumbuhan *output* ini tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto.

Produk domestik bruto (*Gross Domestic Product*) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

### **Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam**

Ada perbedaan dalam menilai pertumbuhan ekonomi antara Islam dan kapitalis. Perbedaan tersebut berangkat dari sudut pandang yang berbeda tentang makna dan tujuan hidup. Berangkat dari konsep dasar kapitalis yang tujuan utamanya pemenuhan kebutuhan materi tanpa batas, maka muncullah sikap pemenuhan terhadap barang-barang dan jasa tanpa batas pula. Lain halnya dengan Islam, walaupun memandang perlu materi, akan tetapi Islam tidak melupakan unsur moral-spiritual dan tidak meletakkan materi sebagai tujuan utama karena dalam ajaran Islam manusia tidak hanya akan menjalani hidup di dunia saja tetapi akan dibangkitkan di akhirat kelak. Sikap demikian sejak pertama sudah terintegrasi dalam kehidupan baik sosial, politik, maupun ekonomi.

Perbedaan yang paling utama antara konsep pertumbuhan dalam Islam dan konvensional adalah terletak pada asas yang dipakai. Dalam Islam, unsur spiritualitas (agama) menjadi prioritas. Arti agama di sini adalah ajaran agama yang termanifestasi dalam al-Quran dan Sunnah Rasul. Meskipun prinsip pertumbuhan ekonomi dalam Islam berdasarkan pada al-Quran dan Sunnah, namun ia tidak memerinci secara detail yang menyangkut masalah teknis. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam hanya menjelaskan secara global yang mencakup petunjuk-petunjuk pokok, kaidah-kaidah, prinsip dan cabang-cabang penting yang bersifat spesifik, karena masalah ekonomi termasuk kemanusiaan yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan lingkungan pada zamannya, sedangkan masalah yang bersifat teknis diselesaikan melalui upaya manusia (*ijtihād*) sesuai dengan lingkungan dan zamannya.

<sup>3</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 9.

Asas-asas pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam ada empat. *Pertama*, tauhid. Konsep tauhid adalah menjelaskan hubungan antara manusia dan Allah. Manusia harus patuh pada Allah SWT. Kepatuhan manusia dapat dilihat dari tingkah laku atau tindakan mereka mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya dengan cara ikhlas dan menyeluruh. *Kedua*, *rubūbiyyah*, konsep yang menerangkan sifat Allah. Sifat Allah adalah penguasa di alam ini. Dia yang berkuasa membuat aturan untuk menjamin dan membimbing kehidupan manusia supaya sempurna dan sejahtera. Dia berkuasa untuk menjaga, mengawal, dan mengurus kehidupan makhluk ke arah kesempurnaan.

*Ketiga*, *khalifah*. Manusia sebagai utusan Allah di muka bumi ini. Tanggung jawab utamanya ialah pemegang amanah Allah dalam segala aspek seperti akhlak, ekonomi, politik, dan sosial. Sebagai pemegang amanah, manusia tidak boleh merusak alam ini. Pembangunan yang hendak dijalankan adalah memberi kebaikan seperti yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi-Nya. Oleh karena itu, manusia wajib mengindari dari melakukan pembangunan yang merusak, yaitu pembangunan yang membawa pada keruntuhan, kekacauan, dan kezaliman/tidak adil. Asas terpenting untuk melaksanakan tugas khalifah selain daripada iman adalah ilmu. Ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu tentang realitas fisik. Merubah kedudukan ilmu tersebut berarti telah mengubah kedudukannya yang asli dan perubahan yang dilakukan menyalahi *sunnah Allah*, maka ilmu tersebut akan merusak, bukan memperbaiki.

*Keempat*, *tazkiyah*. *Tazkiyah* merupakan mekanisme utama mewujudkan pertumbuhan, termasuk sumber daya manusia. *Tazkiyah* melibatkan proses penyucian dinamik yang perlu dilakukan oleh setiap umat manusia sekiranya dia mempunyai keinginan untuk maju dan sejahtera. Manusia perlu menyucikan hubungan antara dirinya dan Allah, manusia dengan manusia dan makhluk lain di dunia.

Apa yang membedakan pertumbuhan ekonomi antara kapitalis (konvensional) dan Islam. Al-Ghazālī menyatakan bahwa pertumbuhan dalam Islam menyangkut pembangunan fisik, mental, dan spiritual. Sedangkan menurut Hiedar Naqvi, pertumbuhan dalam kerangka Islam meliputi aspek moral-spiritual dan material kehidupan manusia dengan rincian *pertama*, tuntutan islami untuk menjamin dan mengamankan pendistribusian pendapatan (kemakmuran) secara adil dan menetapkan batas dalam tingkat pertumbuhan yang layak. *Kedua*, mempertahankan ekuitas antar generasi. Karena pembentukan modal harus diseimbangkan dengan pembentukan modal sumber daya manusia tangguh yang merupakan investasi jangka panjang.

### **Perluakah Ekonomi Politik Islam?**

Setelah melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi menurut Islam yang menawarkan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi dan juga merupakan ajaran Islam tentang optimalisasi pertumbuhan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang ditawarkan ekonomi konvensional pada akhirnya mengundang pertanyaan dengan tidak efisiensinya distribusi pendapatan dan menimbulkan ketidakseimbangan.

Kita tentu mengharapkan suatu pertumbuhan ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan melalui kesempatan kerja penuh. Di sini syariah menganjurkan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kesejahteraan hidupnya. Tujuan syariah juga

mengharuskan manusia menggunakan sumber daya manusia dan mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan dirinya dan manusia lainnya.

Dan menurut saya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi, kebijakan-kebijakan ekonomi di Indonesia, khususnya terkait pertumbuhan ekonomi, sedikit banyak akan melibatkan politik pemerintahan (negara) dengan paradigma/pemikiran ekonomi politik tertentu. Oleh karena itu, agar pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan oleh Islam bisa diterapkan dalam konteks kenegaraan, maka hal yang perlu dilakukan pertama-pertama adalah membangun teori ekonomi politik Islam yang lebih mapan.

Pada level disiplin ilmu ekonomi politik dunia (dan ekonomi politik internasional) hanya berpijak pada tiga pendekatan utama, yaitu Merkantilisme, Liberalisme dan Sosialisme. Kalau seandainya menggunakan salah satu atau campuran dari tiga pendekatan itu jelas akan mereduksi sistem ekonomi politik Islam yang diterapkan di Indonesia. Sebab, Merkantilisme, Liberalisme, dan Marxisme tidak memberikan ruang bagi kebijakan ekonomi politik sebuah negara yang mengambil prinsip nilai-nilai agama.

Dalam sistem ekonomi politik Merkantilisme dan Liberalisme yang dijadikan pijakan hingga saat ini mengadopsi prinsip Utilitarianisme yang menilai manusia ditimbang berdasarkan ukuran kebahagiaan yang diperolehnya. Sebuah tindakan seseorang dikatakan baik, jika mampu meningkatkan kepuasan bagi dirinya. Namun jika tidak, maka harus ditinggalkan. Berdasarkan pandangan ini, kepuasan berbanding lurus dengan utilitas yang diperolehnya.

Pondasi pemikiran utilitarianisme hanya mempertimbangkan tujuan materil saja. Untuk memenuhi kepuasan puncak, dibentuklah lingkaran sistemik mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi produk dengan pelayanan yang sebaik-baiknya. Pandangan ini, menempatkan ekonomi sebagai tujuan final.

Tidak seperti Merkantilisme, ekonomi politik Islam menilai kekayaan alam seperti logam mulia, minyak hanyalah alat, dan bukan ukuran kesejahteraan maupun kekuasaan sebuah negara tersebut. Mazhab ekonomi politik Islam juga tidak sependapat dengan Merkantilisme yang memandang perekonomian internasional sebagai ajang konflik dari pada kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Kasus Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

Ketika membicarakan situasi ekonomi sebuah negara, tentu kita akan bersentuhan dengan permasalahan yang tidak hanya bersifat aspek hilir (tingkat dan keadaan ekonomi penduduk), tetapi juga terkait dengan aspek yang paling hulu, yaitu teori dan perspektif ekonomi politik yang menjadi landasan sebuah kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan ekonomi yang diambil negara Indonesia. Jika paradigma ekonomi yang dimiliki suatu negara itu baik, maka baik juga kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Sebaliknya, apabila paradigma ekonomi yang dimiliki suatu negara itu tidak baik, hanya mengutamakan kepentingan pihak-pihak tertentu misalnya, maka yang terjadi adalah tatanan ekonomi yang timpang.

Memang benar, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin tinggi, yaitu di atas 6 persen sebagaimana penjelasan Salamuddin Daeng dengan artikelnya berjudul “Mengapa Pertumbuhan Ekonomi Memiskinkan?” yang terbit di *Harian Sinar Harapan* pada Jumat, 28

Desember 2012. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi global.

Namun jika ditelisik lebih mendalam, pertumbuhan yang dicapai oleh pemerintahan sekarang ini dihitung dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), selama delapan tahun terakhir, pemerintah gagal mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Angka kemiskinan terus bertambah hingga 110 juta jiwa, diukur dengan pendapatan USD 2 dolar *Purchasing Power Parity* (PPP). Sementara pengangguran juga semakin tinggi. Sebanyak 75 persen pekerja hidup di sektor informal. Di tengah APBN yang tinggi, infrastruktur dasar rakyat justru rusak parah.

Mengapa bisa terjadi demikian? Mengapa pertumbuhan yang tinggi tidak menyejahterakan rakyat? Pertanyaan ini sesungguhnya memiliki jawaban yang sederhana. Pertumbuhan ekonomi Indonesia didasarkan pada perhitungan PDB yang justru sebagian besar tidak dikontribusikan oleh rakyat Indonesia. Pertumbuhan yang didasarkan PDB inilah yang menyesatkan.

Bagaimana PDB dihasilkan? Rumus PDB berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah  $Y = C + I + G + (X - M)$ . Jika diamati lebih mendasar seluruh faktor penyumbang PDB bersifat membahayakan ekonomi dan sekaligus merusak tatanan sosial dan lingkungan. Anatomi dari faktor-faktor pembentuk PDB Indonesia tersebut: C (Consumption), pertumbuhan dalam konsumsi ditopang oleh kredit konsumsi, seperti *credit card*, kredit perumahan, kredit properti, yang saat ini telah berada pada tingkat membahayakan jika terjadi kredit macet, dikarenakan rendahnya upah, produksi, dan produktivitas nasional.

Kredit macet berpotensi meluluhlantakkan perbankan dan perekonomian nasional. Selain itu, sumber keuangan perbankan yang disalurkan untuk kredit konsumsi semakin didominasi dana asing sehingga dapat menjadi faktor pemicu bangkrutnya sektor keuangan nasional akibat terlilit utang.

Selanjutnya faktor I (Investasi), jika diamati 75 persen investasi langsung (FDI) di Indonesia berasal dari investasi luar negeri. Sementara investasi sektor keuangan derivatif seperti bursa saham dan pasar keuangan lainnya hampir 50 persen didominasi asing. Investasi dalam surat utang pemerintah mayoritas adalah asing. Investasi pada sektor keuangan melahirkan kerentanan ekonomi yang tinggi.

Investasi dalam pertambangan, minyak, dan batu bara yang mengeruk bahan mentah untuk keperluan ekspor menjadi sumber utama dominasi dan eksploitasi modal asing atas kekayaan alam Indonesia. Sementara G (Pengeluaran Pemerintah) adalah pengeluaran pemerintah yang selalu ditopang oleh utang luar negeri yang terakumulasi semakin besar. Pemerintah menetapkan sistem anggaran defisit dan memburu utang untuk meningkatkan APBN. Sementara APBN menerima beban bunga dan cicilan utang pokok yang tinggi, yang menyebabkan APBN akan ambruk jika tidak ada utang baru.

Yang paling membahayakan adalah X - M (Ekspor - Impor) di mana ekspor Indonesia ditopang oleh ekspor bahan mentah hasil tambang, migas, perkebunan, yang hasil dan keuntungannya dinikmati oleh segelintir perusahaan asing sebagai pelaku ekspor hasil pertambangan, migas, perkebunan. Parahnya ekspor yang dilakukan oleh investor asing dihitung sebagai ekonomi nasional.

Sisi lain Indonesia melakukan impor pangan, dan hasil industri dari negara maju. Indonesia terus mengalami defisit perdagangan dalam beberapa bulan terakhir. *Export raw material* telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin parah dan konflik agraria yang meluas. Sementara impor hasil industri telah menyebabkan petani semakin miskin dan industri nasional kolaps.

Jika didalami, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir selain palsu, juga membahayakan karena sumber pertumbuhannya bersifat merusak baik dalam dimensi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Pertumbuhan ekonomi ini sama persis dengan watak ekonomi kolonial. Dalam rezim yang berkuasa saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru semakin memiskinkan rakyat. Tidak hanya itu, pertumbuhan yang besar akan menjadi malapetaka bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Berkenaan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah (pertumbuhan ekonomi) yang berpotensi menimbulkan malapetaka. Dalam prinsip dasar sistem ekonomi Islam, di sana sebenarnya sudah terkandung tentang jaminan sosial. Artinya setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga dalam memenuhi kebutuhan sesuai prinsip hak untuk hidup.

Berkenaan dengan etika, ada empat aksioma filsafat etika dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Syafaruddin Alwi, yaitu *unity, equilibrium, free will, responsibility*. Konsep *unity* menjelaskan bahwa yang absolut itu hanya Allah. Konsep ini menunjukkan dimensi vertikal dalam Islam. Semua kehidupan manusia dalam dimensi politik, ekonomi dan sosial religius tidak lepas dari aksioma *unity* yang terintegrasi sepanjang lini hubungan vertikal itu. Hubungan horisontal adalah hubungan antarmanusia yang juga tidak lepas dari pengawasan Allah.

Aksioma keseimbangan menjelaskan prinsip keadilan dalam ekonomi, di mana manusia diberi kebebasan yang terbatas dalam lingkup kreativitas kehidupan di bidang politik, ekonomi, sosial dan hanya Allah yang paling *absolute* memiliki kekuasaan atas semua *resources*.

Kebebasan berkehendak (*freewill*) dalam kehidupan ekonomi diperbolehkan dalam Islam yang kebebasan ekonomi itu tidak lepas dari kontrol negara. Aksioma tanggung jawab merupakan prinsip yang jelas tentang bagaimana redistribusi kekayaan atau sumber-sumber dibagikan di antara berbagai kelas dan kelompok masyarakat. Doktrin tanggungjawab menunjukkan suatu prinsip yang dinamis dalam hubungan dengan perilaku manusia.

Implikasi dari nilai-nilai yang terkandung di dalam filsafat etika yang dikemukakan Naqvi yang dipaparkan Syafaruddin Alwi, ketika diintegrasikan ke dalam perilaku bisnis melalui negosiasi, strategi dan taktik yang dijalankan para pihak yang terlibat, secara konsekuen mengarah kepada hasil akhir yang bersifat *win-win*. *Bargaining* lebih cenderung bersifat *soft* (hubungan baik) dari pada bersifat *hard* (keuntungan sendiri).

Etika bisnis dan ekonomi yang dikembangkan dari nilai-nilai sosial, budaya dan agama sangat diperlukan karena berbagai alasan antara lain, tidak semua pelaku bisnis peduli terhadap prinsip-prinsip bisnis dan persaingan yang sehat. Kecenderungan yang umumnya terjadi adalah, perilaku bisnis lebih mengutamakan keuntungan tetapi mengabaikan integritas

moral, dalam proses meraih keuntungan tersebut. Alasan lain adalah persaingan bisnis global mengandung konsekuensi penerapan etika bisnis dalam lintas kultural potensial menimbulkan perbedaan nilai-nilai dan prinsip-prinsip bisnis yang menjadi dasar bertindak dalam memilih strategi dan taktik serta pengambilan keputusan dalam negosiasi.

Berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat namun tidak menyumbangkan kesejahteraan masyarakat. Konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB (Produk Domestik Bruto) dan per kapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah meningkatkan pertumbuhan menurut konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Islam dan ajarannya menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan *an sich* bukan menjadi tujuan utama, kecuali dibarengi dengan pemerataan. Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan. Berdasarkan prinsip ini, maka paradigma *trickle down effect*, yang dikembangkan pihak Barat dan pernah diterapkan di Indonesia selama rezim orde baru, bertentangan dengan konsep keadilan ekonomi menurut Islam. Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis dicirikan oleh menonjolnya peran perusahaan swasta (*private ownership*) dengan motivasi mencari keuntungan maksimum, harga pasar akan mengatur alokasi sumber daya, dan efisiensi. Sistem ini pun selalu gagal dalam membuat pertumbuhan dan pemerataan berjalan seiring.

Sistem ekonomi kapitalis yang bebas nilai pada akhirnya menghasilkan manusia yang tamak, boros dan angkuh. Sistem kapitalis juga telah melahirkan sejumlah bankir hebat, beberapa industriawan yang kaya raya, sejumlah pengusaha yang sukses. Dibalik keberhasilannya, sistem ekonomi ini telah mengakibatkan banyak konsumen yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimumnya. Kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin terjadi terjadi secara tajam. Perusahaan-perusahaan yang lemah akan tersingkir dan tersungkur. Perlu ditegaskan, bahwa melekatnya hak orang lain pada harta seseorang (QS. 70:24), bukanlah dimaksudkan untuk mematahkan semangat karya pada setiap individu atau menimbulkan rasa malas bagi sebagian orang.

Dalam perspektif ekonomi Islam, proporsi pemerataan yang betul-betul sama rata, sebagaimana dalam sosialisme, bukanlah keadilan, malah justru dipandang sebagai ketidakadilan. Hal ini menggambarkan bahwa Islam menghargai prestasi, etos kerja dan kemampuan seseorang dibanding orang yang malas. Dasar dari sikap yang kooperatif ini tidak terlepas dari prinsip Islam yang menilai perbedaan pendapatan sebagai sebuah sunnatullah. Landasannya, antara lain bahwa etos kerja dan kemampuan seseorang harus dihargai dibanding seorang pemalas atau yang tidak mampu berusaha.

Bentuk penghargaannya adalah sikap Islam yang memperkenankan pendapatan seseorang berbeda dengan orang lain, karena usaha dan ikhtiarnya. Firman Allah, “*Sesungguhnya Allah melebihkan rezeki sebagian kamu atas sebagian lain*”. (QS. 16:71). Namun, orang yang diberi kelebihan rezki, harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu (*dhu’afā*). Sehingga seluruh masyarakat terlepas dari kemiskinan.

Konsep keadilan sosio-ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan. Sehingga timbul anggapan di sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem sosialisme. Bahkan pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi islami.

Pendapat dan pandangan yang menyatakan kemiripan sistem keadilan sosio Islam dengan sosialisme tidak sepenuhnya benar, malah lebih banyak kekeliruannya. Prinsip ekonomi sosialisme, yang menolak kepemilikan individu dan menginginkan pemerataan pendapatan, jelas berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Sosialisme sama sekali tidak mengakui hak milik individu.

Reaksi Marxisme dibungkus secara politis revolusioner dalam paham komunis yang intinya mengajarkan bahwa seluruh unit ekonomi dikuasakan kepada negara yang selanjutnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara merata. Hal ini didasarkan semangat pertentangan terhadap pemilikan individu. Sedangkan dalam ekonomi Islam, penegakkan keadilan sosio-ekonomi dilandasi oleh rasa persaudaraan (*ukhuwwah*), saling mencintai (*mahabbah*), bahu membahu (*takāful*) dan saling tolong menolong (*ta'āwun*), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat.

### **Ekonomi Politik Islam**

Sebagaimana telah disinggung di atas, kalau kita mau membenahi sistem perekonomian negara, maka kita juga perlu membangun paradigma atau teori ekonomi-politik yang melatarbelakanginya. Berbicara mengenai teori ekonomi politik, itu artinya kita berbincang mengenai bagaimana pemerintah/negara menyusun mekanisme yang memungkinkan seluruh partisipan di pasar mau berbagi informasi. Inilah yang mendasari terjadi peristiwa negosiasi, misalnya antara pemerintah Indonesia tentang pemberian dana dengan pihak IMF atau antara buruh dan pemodal dalam penentuan upah minimum.

Islam sebagai sebuah sistem kepercayaan (*belief system*) yang bukan hanya bersifat ritual, tetapi juga *mu'āmalah*. Ini mengandung makna bahwa Islam tidak hanya menyangkut kesejahteraan manusia di bumi ini, tetapi juga di akhirat kelak yang tentunya mempunyai aturan main tersendiri terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi politik sebuah masyarakat, bangsa, dan umat.

Aturan ekonomi politik Islam akan berdasarkan syariah (dengan al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai dasar utama).

Secara umum, ekonomi politik Islam adalah sebuah sistem ekonomi politik yang akan menjadikan fungsi negara sebagai penegak hukum dan keadilan, yang akan memberikan perlindungan terhadap keyakinan, kehidupan, kekayaan, kehormatan dan keturunan segenap masyarakat yang berada dalam yurisdiksi kekuasaan negara tersebut. Hal ini terkait dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, atau tujuan-tujuan syariah. Menurut al-Shātibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *ḍarūriyyah*, *ḥājjiyyah*, dan *taḥsīniyyah*.

Selain itu, negara atau pemerintahan harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam hal terkait dengan “*Public Service*,” menjaga kerapihan dan kebersihan lingkungan dan memberikan hukuman kepada para pelanggarnya, menjamin kebebasan berusaha dari setiap anggota masyarakat, dan bahkan memfasilitasi setiap upaya bisnis warga negara khususnya kelompok usaha menengah, kecil dan mikro. Negara wajib menjamin terbukanya akses pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang baik dalam hal “*hygiene*” dan “*sanitation*.”

### **Prinsip Dasar Ekonomi Politik Islam**

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi diperlukannya pengembangan teori, pemikiran, atau konsep-konsep ekonomi politik Islam dewasa ini. *Pertama*, dasar keyakinan (*belief system*). Kedua, adalah dasar kebutuhan umat manusia (*humanity's needs*). Perihal yang pertama, hal ini kembali kepada “*logical consequence*” dari keyakinan kita sebagai muslim. Sebagai muslim, kita percaya bahwa Islam adalah bukan sekadar aturan-aturan ritual, tetapi juga sebagai “*way of life*”, sebagai aturan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Islam ada akidah (keimanan), akhlak, *mu'āmalah*, dan *jihād*. Al-Quran menegaskan bahwa keberhasilan yang hakiki bagi seorang insan adalah keberhasilan di mata Allah, manakala dia mendapatkan ridha Allah dalam kehidupannya, mematuhi perintah dan larangan-Nya, dan manakala dia pada akhirnya ditempatkan di Surga, setelah berakhirnya kehidupannya di dunia ini.

Sebagai sebuah ajaran dan keyakinan yang komprehensif dan juga bersifat ideologis, maka seorang muslim berkomitmen untuk mengembangkan ilmu-ilmu dan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan paradigma qur'ani ataupun paradigma Islam yang bersifat universal. Sejarah Islam telah menunjukkan kita semua bahwa ilmu dan peradaban yang dibangun pada masa kekuasaan Islam, pada masa di mana Islam merupakan sebuah “*dīn wa dawlah*”, masa sejak berdirinya sebuah negara yang berdasarkan Islam di Madinah sampai dengan masa kekuasaan Khalifah Usmaniyah di Turki, adalah selalu berada dalam kerangka Wahyu, berada dalam kerangka aturan-aturan Islam yang mampu mengayomi dan memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Oleh karena itu, dalam konteks dunia modern sekarang ini, adalah bagian dari tanggung jawab kita pula untuk selalu menjadikan keyakinan kita terhadap Islam sebagai ‘*reference point*’, baik dalam pengembangan hukum-hukum maupun ilmu dan pemikiran-pemikiran, hal ini mengingat konsep dasar Islam tidak memisahkan antara kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan kita di akhirat kelak.

### **Pandangan Ekonom Muslim**

Salah satu pemikir Muslim abad 20 yang membahas mengenai ekonomi politik Islam di antaranya adalah Ayatullah Muhammad Baqr al-Sadr. Baqr al-Sadr adalah seorang pemikir Muslim yang sekaligus juga seorang aktivis politik. Beliau adalah tokoh pergerakan yang melakukan perlawanan terhadap rezim Bath Saddam Hussain, beliau mati dieksekusi oleh Rezim Saddam Hussain sekitar awal 80-an. Beliau adalah tokoh yang memvisikan tegaknya sebuah sistem politik Islam yang akan menggantikan sistem-sistem yang ada di dunia muslim yang dianggap korup. Di antara buku-buku Sadr yang cukup dikenal di dunia Barat adalah buku yang berjudul *Falsafatunā* (*Our Philosophy*) dan *Iqtisādunā* (*Our Economy*).

Sadr membahas secara detail hubungan dan struktur ekonomi dari sebuah negara Islam, yang di antaranya adalah hubungan ekonomi manusia, teori Islam mengenai distribusi, distribusi dari kekayaan alam, distribusi dari kekayaan hasil produksi, penyaluran dari perilaku dasar manusia, pembangunan ekonomi, dan peran negara. Ia mengatakan subordinasi dunia Islam di bawah kebiasaan bangsa Eropa, sebagai pemimpin peradaban Barat, menampakkan dirinya dalam tiga bentuk berturut-turut. *Pertama*, subordinasi politik yang ditandai dengan penguasaan secara langsung negara-negara yang maju secara ekonomi atas negara-negara terbelakang. *Kedua*, subordinasi ekonomi yang berjalan seiring dengan kemunculan para penguasa yang mandiri secara politik di negara-negara terbelakang. Dan *ketiga*, subordinasi dalam metode yang dipraktikkan orang-orang di dunia Islam dalam banyak percobaan.

Pemikir muslim lain yang juga banyak membahas tentang ekonomi politik Islam adalah Masudul Alam Choudhury, pemikir muslim yang cukup dikenal dengan literatur epistemologi dan ekonomi politik Islam. Seperti halnya Sadr, Choudhury juga menggunakan pendekatan epistemologi dari kajian ekonomi politik Islamnya, yakni bahwa setiap ilmu yang terbangun adalah berdasarkan landasan keyakinan dan ideologis dari manusia. Dalam hal ini al-Quran dan Sunnah adalah dasar dari setiap pengembangan Ilmu dalam tradisi Islam. Proses penyatuan antara keyakinan dan ilmu ini sebenarnya telah berjalan ratusan tahun dalam sejarah Islam.

Choudhry melihat bahwa aplikasi paradigma tauhid dalam ekonomi politik akan menampilkan pemikiran alternatif dari model ekonomi konvensional sekarang ini. Beberapa hal yang dibahas Choudhry dalam kaitan aplikasi paradigma tauhid dalam ekonomi politik adalah terkait dengan hak-hak kepemilikan, kerja, produktivitas, teori nilai, alokasi sumber daya, harga, dan formasi preferensi (*preference formation*).

Secara umum dapat dikatakan bahwa perkembangan kajian ekonomi politik Islam akan berjalan seiring dengan perkembangan kajian ilmu ekonomi Islam (*islamic economics*). Karena pada dasarnya, ini adalah sekadar pengembalian tradisi intelektual Islam yang sebelumnya sempat menjadi pusat peradaban dunia. Dan ini juga sekaligus membangkitkan kembali paradigma tauhid yang lebih bersifat komprehensif dalam memandang kehidupan manusia di muka bumi ini.

Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah apakah para pegiat ekonomi syariah di Indonesia memperjuangkan sumber daya-sumber daya ekonomi yang kini sedang dijajah oleh orang-orang asing tersebut? Jawabannya adalah tidak. Apakah para eksponen ekonomi syariah di negeri ini malah asyik mengembangkan teori-teori akad untuk lembaga keuangan syariah? Jawabannya adalah iya. Di sinilah kita menyaksikan lonceng kematian ekonomi syariah sebagai ekonomi pembebasan sedang berbunyi. Ekonomi syariah tidak punya daya dobrak dan daya lawan atas ketidakadilan ekonomi di Nusantara ini.

Daya bebas ekonomi syariah semakin terlihat lunglai ketika ekonom-ekonom syariah mempertahankan pemahaman ahistoris, bukan historis. Selama ini pemahaman kita mengenai kisah-kisah yang ditulis dalam al-Quran cenderung sangat bersifat ahistoris, padahal maksud al-Quran menceritakan kisah-kisah itu adalah justru menyuruh kita berpikir historis. Kita ambil contoh misalnya tentang bangsa Israel yang tertindas pada zaman Firaun yang sering

kita pahami pada konteks zaman itu. Kita tidak pernah berpikir bahwa apa yang disebut kaum tertindas itu sebenarnya ada di sepanjang zaman dan ada pada setiap sistem sosial.

Pada zaman feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme, selalu terdapat apa yang disebut kaum *mustaḍ'afin* (kaum tertindas). Oleh karena itu, sesungguhnya kita harus menjelaskan siapakah golongan-golongan yang berapa pada posisi tertindas itu dalam sejarah, termasuk pada saat sekarang, yaitu pada sistem sosial ekonomi yang memungkinkan terjadinya penguasaan sumber-sumber ekonomi di tangan segelintir elite. Contoh lainnya adalah bahwa di dalam sebuah ayat kita diperintahkan untuk “membebaskan mereka yang terbelenggu”. Dengan cara berpikir historis, kita akan dapat mengidentifikasi siapakah yang dimaksud sebagai golongan “yang terbelenggu” itu di dalam sistem ekonomi sekarang ini.

Dalam hal ini, saya sangat setuju dengan pandangan Asghar Ali Engineer, intelektual asal India, yang memahami konsep riba dengan tepat sekali sebagaimana yang dilarang oleh al-Quran. Menurut Engineer, konsep riba sangatlah penting, tetapi kurang dipahami secara baik. Riba bukan sekadar tidak menerapkan bunga dalam perbankan yang kemudian menggantinya dengan sistem *profit and loss sharing*. Pelarangan riba yang merupakan ruh ekonomi syariah harus dipahami sebagai tindakan eksploitatif, dan bukan semata-mata tingkat bunga tetap. Tujuan hakiki pelarangan riba dalam ekonomi syariah tidak bisa diwujudkan tanpa menghapus eksploitasi dalam segala bentuknya.<sup>4</sup>

Yang penulis tekankan dalam tulisan ini sebenarnya adalah ekonomi politik Islam ekonomi politik pembebasan. Segala bentuk tindakan ekonomi, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, harus menjadi target pembebasan para pendukung ekonomi syariah. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah yang tidak menguntungkan rakyat harus menjadi perhatian utama para eksponennya. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan organisasi-organisasi ekonomi internasionalnya lainnya yang tidak menguntungkan negara-negara dunia ketiga, terutama Indonesia, harus menjadi perhatian utama para penggembor ekonomi syariah dewasa ini. Inilah hakikat pelarangan riba yang ada dalam ekonomi politik Islam, sebagai alat untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan ekonomi bangsa-bangsa lain.

## **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas, penulis dapat memberikan beberapa hal yang menurut penulis penting untuk dijadikan kesimpulan. Ekonomi politik Islam hanyalah satu bidang ilmu yang akan dibangun berdasarkan paradigma tauhid. Pada dasarnya, semua ilmu pengetahuan yang ada perlu dibangun pula dalam kerangka paradigma tauhid. Munculnya dan berkembangnya peradaban Islam selama lebih dari seribu tahun selalu dilandaskan oleh paradigma tauhid. Pada masa itu, seluruh ilmu pengetahuan dibangun berdasarkan landasan tauhid.

Dalam konteks kebijakan ekonomi politik Indonesia, pemisahan ilmu pengetahuan dan agama yang dibangun oleh paradigma sekuler di dunia Barat, yang dimulai pada masa “*Renaissance*” sekitar abad 15-16, yang ditandai oleh kejatuhan pengaruh gereja di masyarakat, menurut hemat saya, tidaklah tepat untuk menjawab persoalan-persoalan

---

<sup>4</sup> Asghar Ali Engineer, *Islamic Economics: Progressive Perspective* dalam Jomo K.S (ed) “*Islamic Economics Alternatives: Critical Perspectives and New Directions*”, 122-123

ekonomi kita sekarang ini. Ini artinya bahwa teori ekonomi politik Barat dan teori ekonomi politik Islam mempunyai sistem keyakinan yang berbeda, di mana salah satu konsep dasar tauhid yang inheren dengan ekonomi politik Islam adalah integralitas dari kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat kelak. Sebagai kosekuensinya, ketika negara Indonesia menerapkan ekonomi politik Islam, ia tidak hanya mengutamakan kepentingan duniawi semata, tetapi juga memprioritaskan aspek ukhrawi.

Signifikansi pengembangan konsep ekonomi politik Islam bagi dunia Muslim umumnya, dan negara Indonesia pada khususnya, adalah dalam rangka membebaskan masyarakat Indonesia dari kelemahan, kemiskinan dan keterbelakangan dalam percaturan perekonomian dunia yang saat ini semakin menghawatirkan. Ekonomi politik Islam diharapkan akan dapat menyatukan kembali antara *'body'* and *'spirit'* dari dunia muslim, yang selama ini terpisahkan oleh paradigma sekuler yang dominan. Ekonomi politik Islam diharapkan menampilkan terobosan, gebrakan, dan lompatan besar untuk membawa perekonomian Indonesia menuju yang lebih baik.

Penulis bekeyakinan bahwa dampak positif penerapan ekonomi politik Islam dalam pembangunan ekonomi Indonesia akan membawa kesejahteraan umat manusia. Ini tidak lain landasan dasar ekonomi politik Islam dibangun atas dasar ajaran-ajaran Quran dan hadis yang bersifat universal.

Cita-cita ekonomi politik Islam perlu ditopang dengan pemahaman yang holistik mengenai suatu bangsa dan negara. Pembangunan bukan sekedar kajian ekonomi, tetapi juga kajian yang bersifat sosial dan politik. Kajian yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia.

Pendekatan ekonomi politik Islam dalam kaitannya dengan pembangunan atau kebijakan ekonomi Indonesia adalah sebuah proses yang terkait erat dengan persoalan sosial, dan budaya dari sebuah masyarakat dalam kaitannya dengan proses pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi politik Islam perlu mengadakan kajian mendalam terkait dengan persoalan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat Indonesia dalam kaitannya dengan persoalan ketidakadilan, ketimpangan sosial, efektifitas pemerintahan, dan persoalan korupsi.

Akhirnya tujuan strategis dari ekonomi politik Islam adalah keberhasilan pembangunan menyeluruh yang tidak hanya bermanfaat bagi pembangunan dan kemajuan dunia Muslim, tetapi juga dapat berkontribusi besar bagi kemanusiaan secara umum, termasuk di negara-negara maju di Barat sekarang ini, di mana ekonomi politik Islam diharapkan dapat menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang lebih etis (ketimbang materialis), lebih peduli terhadap sesama, lebih manusiawi, lebih ramah lingkungan, lebih merata, mempunyai visi pemikiran jangka panjang (bukan jangka pendek), dan peduli terhadap pembangunan yang berkelanjutan, dan yang terpenting mampu menjaga moralitas dalam masyarakat dan negara.

Penulis bersikap optimis bahwa ekonomi politik Islam di Indonesia akan bisa diterapkan secara baik kalau para pengusungnya mampu melakukan reformasi damai namun prinsipil, menghormati konstitusionalisme, tertib hukum, menjaga akhlak/moral, melakukan pengawasan sosial, menjunjung tinggi kebebasan asasi, menegakkan keadilan kekuasaan dan sebagainya.

### **Daftar Rujukan**

- Ahmad, Khursid. *Economic Development in Islamic Framework*. Liecester: The Islamic Foundation, 1980.
- Ash Shadr, Muhammad Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*. Jakarta: Zahra Publising House, 2008.
- Dahlan, Abd. Aziz. et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, IV. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Engineer, Asghar Ali. "Islamic Economics: Progressive Perspective" dalam Jomo K.S (ed) *Islamic Economics Alternatives: Critical Perspectives and New Directions*. Kuala Lumpur: Iqra, 1993.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Madjid, Nurcholis. *Cita-cita Politik Islam*. Jakarta: Paramadina, 2009.
- Mannan, M. A. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin. Yogyakarta. Dhana Bhakti Wakaf, 1997.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Yustika, Ahmad Erani. *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.